

# Pandangan Mahasiswa Universitas Brawijaya Mengenai Wajah Baru Ibukota Indonesia Terhadap Nilai Pancasila

Yunanda Adella<sup>1</sup>, Amirotul Basyiroh<sup>2</sup>, Muhammad Syarifuddin Al Haqiqi<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Brawijaya Malang, [yunandaadella6@gmail.com](mailto:yunandaadella6@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Brawijaya Malang, [amirotulbasyiroh1@gmail.com](mailto:amirotulbasyiroh1@gmail.com)

<sup>3</sup> Universitas Brawijaya Malang, [muhammadsyarifuddinalhaqiqi@gmail.com](mailto:muhammadsyarifuddinalhaqiqi@gmail.com)

## Info Artikel

### Article history:

Received Jun, 2024  
Revised Aug, 2024  
Accepted Aug, 2024

### Kata Kunci:

IKN, Mahasiswa, Pancasila

### Keywords:

IKN, Pancasila, Students

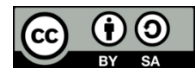
## ABSTRAK

Pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur ini menyisakan sejumlah tanda tanya yang timbul di ruang lingkup masyarakat Indonesia, tak terkecuali pro dan kontra yang berkaitan dengan nilai – nilai Pancasila. Tujuan penelitian ini untuk menyelesaikan perbedaan pandangan terkait pemindahan IKN yang tetap menjunjung tinggi nilai – nilai Pancasila sebagai landasan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Diperoleh hasil data terhadap 3 responden sebanyak 75% responden berharap baik tentang pembangunan IKN ini sendiri. Disisi lain, sebanyak 25% responden masih meragukan terhadap kebijakan pembangunan IKN yang terjamin keefektifannya dalam menangani berbagai permasalahan yang ada di berbagai aspek kehidupan. Dengan ini, masyarakat Indonesia, adanya pembangunan IKN dapat pemeratakan secara adil bagi setiap masyarakat Indonesia bersifat seimbang yang sesuai dengan nilai – nilai Pancasila, utamanya sila ke – 2 dan sila ke – 5”.

## ABSTRACT

*The state capital's move from Jakarta to neighbouring East Kalimantan has left several question marks among Indonesians, including pros and cons related to the values of Pancasila. This research aims to resolve differences in views regarding the transfer of IKN which still upholds the values of Pancasila as the main foundation in national and state life. Data obtained from 3 respondents showed that 75% of respondents had good hopes for the development of the IKN itself. On the other hand, as many as 25% of respondents still doubt the IKN development policy which guarantees its effectiveness in dealing with various problems that exist in various aspects of life. "With this, for the Indonesian people, the development of IKN can provide equal distribution for every Indonesian community in a balanced manner that is by the values of Pancasila, especially the 2nd and 5th principles".*

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



## Corresponding Author:

Name: Yunanda Adella  
Institution: Universitas Brawijaya Malang  
Email: [yunandaadella6@gmail.com](mailto:yunandaadella6@gmail.com)

## 1. PENDAHULUAN

Pemindahan ibu kota negara ialah satu dari sekian banyak proyek besar yang digagas oleh Presiden Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia, dimana beliau telah mengumumkan bahwa pemindahan ibu kota negara akan dilakukan di Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 26 Agustus 2019. Pemindahan ibu kota juga telah diotorisasi melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Area Kalimantan dinilai ideal untuk penempatan wilayah ibu kota baru negara menggantikan Jakarta. Namun, adanya pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur menyisakan berbagai tanda tanya yang muncul di lingkup masyarakat Indonesia, termasuk pro dan kontra terkait nilai-nilai Pancasila. Hal ini tentunya mendapatkan berbagai respon dan tanggapan yang berbeda di kalangan masyarakat Indonesia. Sebagian masyarakat mendukung pemindahan ibu kota demi modernisasi dan perkembangan teknologi yang dapat memberikan berbagai manfaat dan keuntungan. Di sisi lain, ada juga masyarakat yang menentang pemindahan ibu kota karena menganggap hal tersebut berlawanan terhadap nilai-nilai Pancasila. Padahal Pancasila ialah dasar negara Indonesia yang merupakan pedoman dasar dalam penyelenggaraan dan melaksanakan pemerintahan negara Indonesia. Pancasila ini sebagai cerminan bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari sebagai warga masyarakat, berbangsa dan bernegara. Sesuai dengan yang diketahui bahwa Pancasila terdiri dari lima sila yang mengandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan (Dimarta, 2020).

Sejumlah isu menjadi dasar pemikiran bahwa pemindahan ibu kota harus dilakukan secepatnya. Pertama, tingkat densitas penduduk, khususnya di area Jakarta dan Pulau Jawa, dinilai sudah melewati batas. Kedua, terdapat gap pengembangan ekonomi antar wilayah juga menjadi pertimbangan kuat perpindahan ibu kota negara (Saputra et al., 2018). Pemusatan kegiatan pemerintahan dan bisnis di pulau Jawa, khususnya DKI Jakarta, sehingga memperlambat laju pertumbuhan ekonomi dan pemulihan ekonomi di setiap daerah di berbagai wilayah di Indonesia. Daerah-daerah di Indonesia tentunya memiliki karakter tersendiri dalam pembangunan ekonomi di daerahnya masing-masing. Selain itu, disparitas wilayah yang juga akan membuat laju pertumbuhan ekonomi nasional menjadi terhambat, sehingga pemerintah dituntut mampu melakukan upaya penyetaraan ekonomi secara menyeluruh (Silalahi, 2019). Menindaklanjuti permasalahan yang ada, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melakukan kajian pemindahan ibu kota Indonesia sebagai langkah pemulihan pembangunan karena ibu kota baru memiliki lokasi yang strategis secara geografis menuju kawasan industri di Provinsi Kalimantan Timur (Pribadi et al., 2021). Dengan demikian, keputusan ibu kota pindah ke Indonesia Timur diharapkan mengurangi disparitas dan terwujudnya pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan, serta menciptakan ibu kota baru yang selaras dengan jati diri bangsa.

Dalam menyikapi pemindahan ibu kota ini menyebabkan isu hangat yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat Indonesia, utamanya terkait dengan nilai – nilai Pancasila, sehingga perbedaan pandangan yang ada membutuhkan dialog dan konsultasi sebagaimana melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat dalam mengambil keputusan yang bersifat solutif dan tepat untuk kepentingan bersama. Maka dari itu, dilakukan penelitian ini dalam menyelesaikan perbedaan pandangan terkait pemindahan IKN yang tetap menjunjung tinggi nilai – nilai Pancasila sebagai landasan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan pada 15 Mei 2024 – 20 Mei 2024 di Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur. Metode yang digunakan dalam mencari dan mengumpulkan informasi pada penelitian ini adalah pendekatan secara kualitatif dengan metode deskriptif. Metode penelitian kualitatif merupakan cara yang digunakan untuk meneliti objek pengamatan sebagaimana analisis data bersifat induktif (Prasanti, 2018). Kualitatif yang digunakan berupa wawancara sebanyak 3

responden kepada mahasiswa Universitas Brawijaya. Selanjutnya, hasil wawancara dilakukan analisis dan dideskripsikan untuk mengetahui informasi secara faktual, sistematis, dan akurat mengenai sifat, fakta, dan hubungan antar fenomena yang sedang diteliti. Hal ini juga menggunakan data sekunder sebagai data pendukung dalam menunjang data primeryang telah didapatkan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif melalui observasi secara online, wawancara, dan studi dokumentasi berupa foto dan video. Karakteristik responden menggunakan variabel bebas dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi, dan geografis terkecuali mahasiswa Universitas Brawijaya sebagai variabel terkontrol dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1. Karakteristik Responden

No.	Nama	Fakultas
1.	Andy Febriansyah	Pertanian
2.	Merzy Veronika Siringoringo	Ekonomi dan Bisnis
3.	Muhammad Sofyan	Hukum

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggapan responden menjadi hal terpenting dilaksanakannya penelitian ini dalam mengetahui pendapat atau asumsi secara umum mengenai topik permasalahan yang ada. Rencana pemindahan ibukota negara Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan telah memicu berbagai pandangan secara luas yang beragam antara pro dan kontra dalam menanggapi. Untuk memahami persepsi publik, sebuah survei melalui wawancara secara kualitatif dengan melibatkan sebanyak 3 responden kepada Mahasiswa Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur diperoleh hasil data pada tabel 1 dibawah ini sebagai berikut.

Tabel 2. Hasil Wawancara

No.	Nama	Pendapat (Pro/Kontra)
1.	Andy Febriansyah	Pro
2.	Merzy Veronika Siringoringo	Pro
3.	Muhammad Sofyan	Kontra

Berdasarkan hasil wawancara terhadap 3 responden didapatkan bahwa sebanyak 75% responden menyambut baik terhadap gagasan pembangunan ibukota negara baru ini. Hal ini mereka beranggapan rencana pembangunan IKN merupakan langkah berani yang bersifat visioner dalam mengatasi permasalahan yang sudah lama dihadapi di Jakarta. Salah satu responden menyatakan, "Pembangunan ibukota negara baru ini diperlukan untuk pemerataan pembangunan di tempat yang lebih luas, seperti Kalimantan. Hal ini dikarenakan Jakarta yang sudah terlalu padat terhadap jumlah penduduknya, sehingga adanya pemerataan pembangunan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian. Hal ini juga berhubungan dengan nilai sila ke – 5 Pancasila dalam mencapai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia secara merata". Sejauh ini, Jakarta masih memiliki dominasi yang paling besar terhadap perputaran perekonomian sosial, sehingga pemerataan terhadap pertumbuhan ekonomi perlu ditingkatkan di seluruh wilayah Indonesia (Amila et al., 2023).

Responden tergolong dalam generasi muda yang mampu menunjukkan antusiasnya dari berbagai aspek, misalnya aspek ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi dalam menangani keberlanjutan IKN. Responden lainnya menyatakan, "Saya percaya bahwa dengan adanya pembangunan IKN dapat pemeratakan akses teknologi yang lebih modern di seluruh Indonesia melalui pembangunan infrastruktur digital yang memadai. Kota cerdas (smart city) akan memanfaatkan perkembangan teknologi terkini secara efektif dalam meningkatkan pengelolaan sumber daya dan pelayanan publik. Dengan ini, pemerataan secara adil bagi setiap masyarakat

Indonesia dapat seimbang yang sesuai dengan nilai – nilai Pancasila, utamanya sila ke – 2 dan sila ke – 5". Hal ini juga didukung oleh pendapat Hasibuan dan Sulaiman (2019), yang menyatakan bahwa smart city merupakan sebuah langkah hebat berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam memajukan kota dalam suatu negara. Smart city menjadi konsep perencanaan, pengelolaan, dan penataan kota secara terstruktur dalam menciptakan kota masa depan yang berkualitas. Sisanya, sebanyak 25% responden memiliki keraguan terhadap isu pembangunan IKN ini yang dapat menimbulkan beberapa dampak negatif di masa depan nantinya apabila tidak diselenggarakan secara bijak dan tepat. Responden menyatakan, "Bagi saya, rencana pembangunan IKN ini akan meningkatkan pemborosan anggaran negara yang beriringan dengan memengaruhi kelestarian lingkungan di Kalimantan. Selain itu, perlindungan terhadap hak masyarakat adat lokal akan dipertanyakan dalam pemenuhan realisasi nilai Pancasila pada sila ke – 2". Disamping potensi dan keuntungan dari pemindahan ibukota negara yang dilakukan, upaya perlindungan dan penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya terhadap masyarakat lokal adat harus diperhitungkan secara baik dalam proses kebijakannya (Nugroho, 2022).

Dengan demikian, adanya berbagai tanggapan dari responden yang beragam ini menunjukkan adanya asumsi terhadap pandangan seseorang mengenai pemindahan ibukota negara Indonesia dari segala arah. Hal ini disebabkan pemindahan IKN sendiri merupakan proyek besar, sehingga menuai berbagai pro dan kontra. Kontroversi yang ada mencerminkan dinamika dan kompleksitas terhadap nilai – nilai di kehidupan sehari – hari masyarakat Indonesia sebagai warga negara yang menjunjung tinggi nilai – nilai Pancasila.

### **3.1 Hubungan Pemindahan IKN Dengan Nilai Pancasila**

Rencana pembangunan ibukota negara Indonesia atau dikenal dengan IKN ini menjadi topik hangat yang memicu timbulnya berbagai pandangan di masyarakat, khususnya generasi muda yang dijunjung memiliki peran sebagai agen perubahan, pembaharuan, dan pembangunan. Pandangan – pandangan ini tentunya tidak terlepas dari kaitannya dengan nilai – nilai Pancasila yang terkandung sebagaimana menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Berdasarkan hasil data kualitatif yang diperoleh, didapatkan secara keseluruhan hampir semua responden mendukung adanya program perencanaan ini yang dikaitkan dengan dengan nilai Pancasila pada sila ke - 5 yang berbunyi "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia". Hal ini diartikan bahwa dengan pemindahan ibukota dapat pemeratakan secara adil di seluruh rakyat Indonesia yang mampu menerima hak dan kewajiban dari berbagai aspek kehidupan, utamanya pertumbuhan terhadap perekonomian dan sosialnya. Pemindahan ibukota negara Indonesia merupakan hal efektif dalam segala pemerataannya yang mana kesenjangan pembangunan antar wilayah menjadi alasan kuat perencanaan ini. Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amila et al. (2023), yang menyatakan bahwa persentase kontribusi ekonomi nasional terbesar terdapat pada Pulau Jawa, yakni sebesar 59% yang berbeda jauh dengan Pulau Sumatera sebesar 21,31%. Sedangkan, Pulau Kalimantan, Pulas Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, serta Maluku dan Papua hanya mampu memberikan persentase kontribusi kurang dari 10%. Hal ini pemerataan pembangunan IKN yang apabila dikatakan maju, lambat laut akan selalu mengalami perkembangan dikarenakan adanya kemudahan akses – akses yang telah diberikan oleh negara" Hal ini didukung oleh pernyataan dari Darwis et al. (2023), menyatakan bahwa pemindahan IKN ini bertujuan untuk menciptakan pemerataan pembangunan dan keadilan ekonomi, mengurangi beban permasalahan Pulau Jawa, khususnya Kota Jakarta yang overpopulated dalam mewujudkan IKN yang berkelanjutan dan berketahanan, sehingga mampu menciptakan peradaban baru yang akan digunakan sebagai representasi kemajuan bangsa dengan konsep modern, smart, and green city dalam perkembangan teknologi informasi

dan komunikasi, Terkait dengan nilai – nilai Pancasila lainnya, seperti pada sila ke – 1 yang berbunyi “Ketuhanan yang Maha Esa” dapat diakomodasikan dengan nilai ketuhanan yang terkandung di dalamnya melalui pembangunan tempat ibadah dan mengakui keberagaman agama yang berada di lingkungan masyarakat. Pada sila ke – 2 yang berbunyi “Kemanusiaan Adil yang Beradab”, pembangunan IKN dapat menjadi kota yang humanis dengan memperhatikan nilai kemanusiaan antara satu sama lain yang terjamin keadilannya secara keseluruhan. Hal ini berupa pemerataan akses yang mudah dan memadai, dan pelestarian lingkungan dalam menjaga melindungi makhluk hidup di dalamnya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat disertai dengan bukanya peluang baru dalam kemajuan baru. Sedangkan, nilai Pancasila pada sila ke – 3 yang berbunyi “Persatuan Indonesia” dapat menjadi pembangunan IKN sebagai simbol pemersatu bangsa dengan menampilkan kekayaan dan kebudayaan Indonesia dalam menjaga nilai persatuan dan kesatuannya sebagaimana yang dicita – citakan dalam sila ini. Sila ke – 4 pada Pancasila yang berbunyi “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebjiaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan”, hal ini mencakup mengenai pembangunan IKN yang berlandaskan nilai demokrasi dengan melibatkan rakyat dalam mengambil sebuah keputusan untuk kepentingan bersama.

Dengan demikian, hal ini mengindikasikan bahwa responden yang menyakini pembangunan IKN mampu mewujudkan nilai – nilai Pancasila yang dapat menjadi simbol kemajuan bangsa yang sesuai dengan sila ke – 1, meningkatkan kesejahteraan rakyat yang sesuai dengan sila ke – 2, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa yang sesuai dengan sila ke – 3, meningkatkan peranan masyarakat dalam memajukan negara yang sesuai dengan sila ke – 4, dan mampu mempercepat pembangunan nasional secara merata yang sesuai dengan sila ke – 5.

Sedangkan bagi responden yang kurang mendukung hal ini dapat memicu kerusakan lingkungan dan keberagaman agama pada sila ke – 1 nilai Pancasila, mengabaikan hak – hak masyarakat adat pada sila ke – 2, memecah persatuan dan kesatuan bangsa apabila tidak terlaksana dengan baik pada sila ke – 3, nilai demokrasi yang tidak berjalan sesuai kaidahnya pada sila – 4, dan terakhir dapat memperparah kesenjangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosialnya serta memboroskan anggaran negara pada sila ke – 5. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan nilai – nilai Pancasila dalam pembangunan IKN harus mengikuti kaidah dan aturan yang berlaku untuk kepentingan bersama dalam memajukan integritas Indonesia.

### 3.2 *Kekhawatiran Terhadap Pemindahan IKN*

Indonesia tengah bersiap mengukir sejarah baru dengan dilakukannya rencana pemindahan ibukota negara baru sebagai solusi multidimensi bagi berbagai tantangan yang dihadapi oleh

Indonesia. Hal ini dipandang sebagai kesempatan emas untuk “memulai dari awal” dalam perencanaan dan tatanan kota. Namun, tidak semua pihak menyambut positif akan hal ini. Dua responden menyatakan, “Kekhawatiran tersendiri yang saya alami terdapat pada ruang lingkup masyarakat dimana masyarakat luar secara keseluruhan tentunya ada sebagian yang tidak dapat merasakan dampak adanya pembangunan IKN serta takut disalahgunakan oleh para orang berstatus tinggi untuk kepentingan pribadi Selain itu, aspek lingkungan yang dikhawatirkan merusak sumber daya alam sebagaimana IKN dibangun di atas salah satu paru-paru dunia”. Disisilain, responden mendukung hal ini serata diitingi dengan kehati-hatian. Mereka menekankan pentingnya perencanaan matang dengan memperhatikan beberapa permasalahan mengenai logistik, infrastruktur, dan dampak lingkungan. Seorang akademisi di bidang tata kota mengomentari, "Membangun kota dari

nol bukanlah tugas mudah. Kita harus belajar dari kesalahan Brasilia atau Putrajaya." (Hasibuan dan Sulaiman, 2019).

Selain itu, dikhawatirkan masyarakat adat dan penduduk lokal Kalimantan yang telah mengungkapkan keprihatinan terhadap hak - hak tanah adat, pelestarian budaya, dan risiko tersingkir dari tanah leluhur. Kekhawatiran ini muncul disebabkan adanya ketakutan terhadap pembangunan IKN yang dapat menghancurkan nilai – nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat adat, sehingga melanggar prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang berada di sila ke – 2 Pancasila. "Kami ingin pembangunan, tapi tidak dengan mengorbankan identitas kami," ujar seorang pemuka adat (Nugroho, 2022).

Mengenai nilai Pancasila pada sila ke – 5, pembangunan IKN juga harus menjadi pedoman utama dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang berpihak pada seluruh masyarakatnya terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan perekonomiannya, tetapi juga mampu memperhatikan keadilan sosial dan pemerataannya secara keseluruhan. Hal ini juga hal lain yang dikhawatirkan oleh responden terhadap pembangunan IKN yang menyatakan, "Perlunya penerapan strategi yang tepat untuk menghindari kesenjangan ekonomi di Indonesia. Jika hal ini terjadi, dikhawatirkan akses terhadap peluang ekonomi tidak akan pernah merata apabila tidak dikelola dengan baik". Kekhawatiran mengenai pemerataan terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional merupakan hal yang perlu disikapi dengan serius, sehingga pentingnya implementasi nilai Pancasila pada sila ke – 5 dalam mencapai tujuan dan cita – cita pembangunan IKN yang telah dicanangkan dengan niat baik.

### 3.3 Harapan Terhadap Pemandangan IKN

Adanya kekhawatiran terhadap isu pemindahan IKN ini tentunya diiringi dengan harapan-harapan yang ingin dicapai oleh masyarakatnya yang sesuai dengan nilai – nilai implementasi Pancasila. Salah satu responden menyatakan "Semoga pembangunan lancar, bisa meningkatkan ekonomi kita nanti, bisa berdampak ke kota – kota kecil lainnya, dan bisa menjadi salah satu panutan dari kota – kota kecil lain untuk bisa lebih meningkat lagi ekonominya, lebih maju lagi yang sesuai dengan nilai Pancasila. Selain itu, saya berharap dengan adanya pembangunan IKN ini dapat ". Disisi lain, responden menyatakan, "Pembangunan IKN ini diharapkan untuk bisa dirasakan oleh semua kalangan masyarakat, bukan hanya untuk orang yang niat membangun IKN saja. Hal ini dikarenakan terdapat adanya pendapat kontra dari beberapa pihak lain itu sendiri, takutnya orang yang kontra itu bisa beranggapan tidak diajak yang tentunya pada pada nilai Pancasila yang berada di sila ke – 2 tidak dapat direalisasikan dengan baik." Sedangkan terkait dengan aspek masyarakat dan lingkungannya, responden menyatakan, " Pemerintah dapat memperhatikan secara serius terhadap pemenuhan hak-hak asasi manusia dalam nilai Pancasila, khususnya sila ke – 2 kepada masyarakat adat dan penduduk lokal di Kalimantan. Penanganan terhadap perlindungan dan kelestarian lingkungannya juga diharapkan dapat selalu terjaga serta terpelihara dalam menjaga kekayaan sumber dayanya. Dengan demikian, harapan – harapan yang didapatkan dari berbagai responden tentu dilihat dari berbagai aspek kehidupan yang diharapkan dapat sesuai dengan nilai – nilai implementasi yang terkandung di dalam Pancasila.

## 4. KESIMPULAN

Isu pembangunan IKN telah menuai berbagai pro dan kontra secara luas yang terjadi di Indonesia beberapa belakangan ini. Maka dari itu, diperlukan kajian untuk memahami persepsi publik. Berdasarkan hasil wawancara terhadap 3 responden didapatkan bahwa sebanyak 75%

responden menyambut baik terhadap gagasan pembangunan ibukota negara baru ini. Responden beranggapan rencana pembangunan IKN merupakan langkah berani yang bersifat visioner dalam mengatasi permasalahan yang sudah lama dihadapi di Jakarta. Disisi lain, sebanyak 25% responden kurang menyambut secara positif dikarenakan adanya beberapa kekhawatiran apabila pembangunan IKN ini kurang terlaksana secara strategis, khususnya dikaitkan nilai sila – sila Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Kontroversi yang ada mencerminkan dinamika dan kompleksitas terhadap nilai – nilai di kehidupan sehari – hari masyarakat Indonesia sebagai warga negara yang menjunjung tinggi nilai – nilai Pancasila. Hal ini diartikan bahwa dengan pemindahan ibukota dapat pemeratakan secara adil di seluruh rakyat Indonesia yang mampu menerima hak dan kewajiban dari berbagai aspek kehidupan, utamanya pertumbuhan terhadap perekonomian dan sosialnya. Oleh karena itu, pembangunan IKN harus mempertimbangkan nilai – nilai Pancasila dari sila ke – 1 hingga sila ke – 5 secara utuh dalam memaknai sebagai ideologi bangsa Indonesia. Mengedepankan dialog dengan keterlibatan masyarakat dan pembangunan yang inklusif berpotensi menjadi contoh kemajuan dalam menghormati hak – hak asasi manusia dan penegakan dalam nilai – nilai Pancasila.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amila, S., Nugraha, A. A., Sukron, A., dan Rohmah, F. 2023. Analisis Dampak dan Resiko Pemindahan Ibukota Negara Terhadap Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Sahmiya*. 2(1):10-18.
- Darwis, M., dan Rudiadi, R. (2023). Analisa Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara. *Journal of Sharia and Law*, 2(1), 277-296.
- Dimarta, A. F. 2020. Pendidikan Pancasila: Nilai – nilai Pancasila. Universitas Persada Indonesia. Bandung.
- Hasibuan, R. R. A. 2019. Dampak Dan Resiko Perpindahan Ibu Kota Terhadap Ekonomi Di Indonesia. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*. 53(9): 1689–1699.
- Hasibuan, A., dan Sulaiman, O. K. 2019. Smart City, Konsep Kota Cerdas Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Perkotaan Kabupaten/Kota di Kota-kota Besar Provinsi Sumatera Utara. *Buletin Utama Teknik*. 14(2): 127-135.
- Nugroho, B. E. 2022. Perlindungan Hak Masyarakat Adat dalam pemindahan Ibukota Negara. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi (JISIP-UNJA)*. 6(1): 64-78.
- Prasanti, D. 2018. Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan dalam Pencarian Informasi Kesehatan. *Jurnal Lontar*. 6(1): 13-21.
- Pribadi, D. S., dan Utomo, S. 2021. Dampak Perpindahan Ibu Kota Negara terhadap Pemulihan Ekonomi dalam Perspektif Persaingan Usaha. *Jurnal Persaingan Usaha*. 1(2): 27-42.
- Saputra, S. D., dan Halkis, M. 2021. Analisis Strategi Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Pertahanan (Studi Kasus Upaya Pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara). *Jurnal Ekonomi Pertahanan*. 7(2): 192-220.
- Silalahi, S. A. F. 2019. Dampak Ekonomi dan Risiko Pemindahan Ibu Kota Negara 19. *Jurnal Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik*. 9(16): 19–24.